

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR



INSPEKTORAT

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS
INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019-2024**

**TOWARDS ACCOUNTABILITY
AND SERVICE EXCELLENCE**

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan penanganan pandemi Covid 19 yang membutuhkan anggaran besar dalam penanganannya baik melalui refocusing maupun realokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Disamping itu *tetap* melanjutkan dari Visi, Misi dan Program Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 telah disusun dengan beberapa misi utama dan fokus program dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Di antara misi-misi utama yang difokuskan, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatoris.

Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap entitas pemerintahan dalam pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi dan penanganan Covid 19 khususnya dalam pendampingan dan pengawasan mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif dan akuntabel. Publik menuntut agar *good governance* dan *clean government* dapat segera terwujud dalam realita, bukan hanya dalam retorika-retorika mimbar seminar ataupun forum-forum diskusi. Masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur, sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial di Jawa Timur.

Mendasarkan pada hal tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur mencoba untuk mengedepankan isu-isu strategis yang mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 agar arah program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang dapat lebih terfokus pada pencapaian visi dan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sejalan dengan *grand design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan penanganan pandemi covid 19 yang telah digariskan oleh Gubenur Jawa Timur.

Akhirnya, saya selaku Inspektur Provinsi Jawa Timur mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan semangat dalam beraktifitas sehari-hari serta terima kasih atas kerja keras dan kerja sama Tim Penyusunan serta keterlibatan para *stakeholders* dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ini dapat menjadi pedoman arah kinerja pengawasan pada tahun-tahun yang akan datang.

**Surabaya,
INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630325 198903 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	25
Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Perubahan Renstra	28
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	29
Bab 4 Tujuan dan Sasaran	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan	36
Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	39
Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	79
Bab 8 Penutup	83
Lampiran E - Planning	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan pada Periode 2019-2024	19
Tabel 2.2.2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan pada Periode 2019-2024	20
Tabel 2.2.3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan pada Periode 2019-2024	20
Tabel 2.2.4.	Aset Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024	21
Tabel T-C.23.	Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	21
Tabel T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	22
Tabel T-B.35.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	27
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Timur	35
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	38
Tabel 6.1.	Program dan kegiatan tahun 2019	42
Tabel 6.2.	Program dan Kegiatan Tahun 2020	46
Tabel 6.3.	Program dan kegiatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024	52
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	79
Tabel 7.2	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Nawa Bhakti	80
Tabel 8	E-Planning	84

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

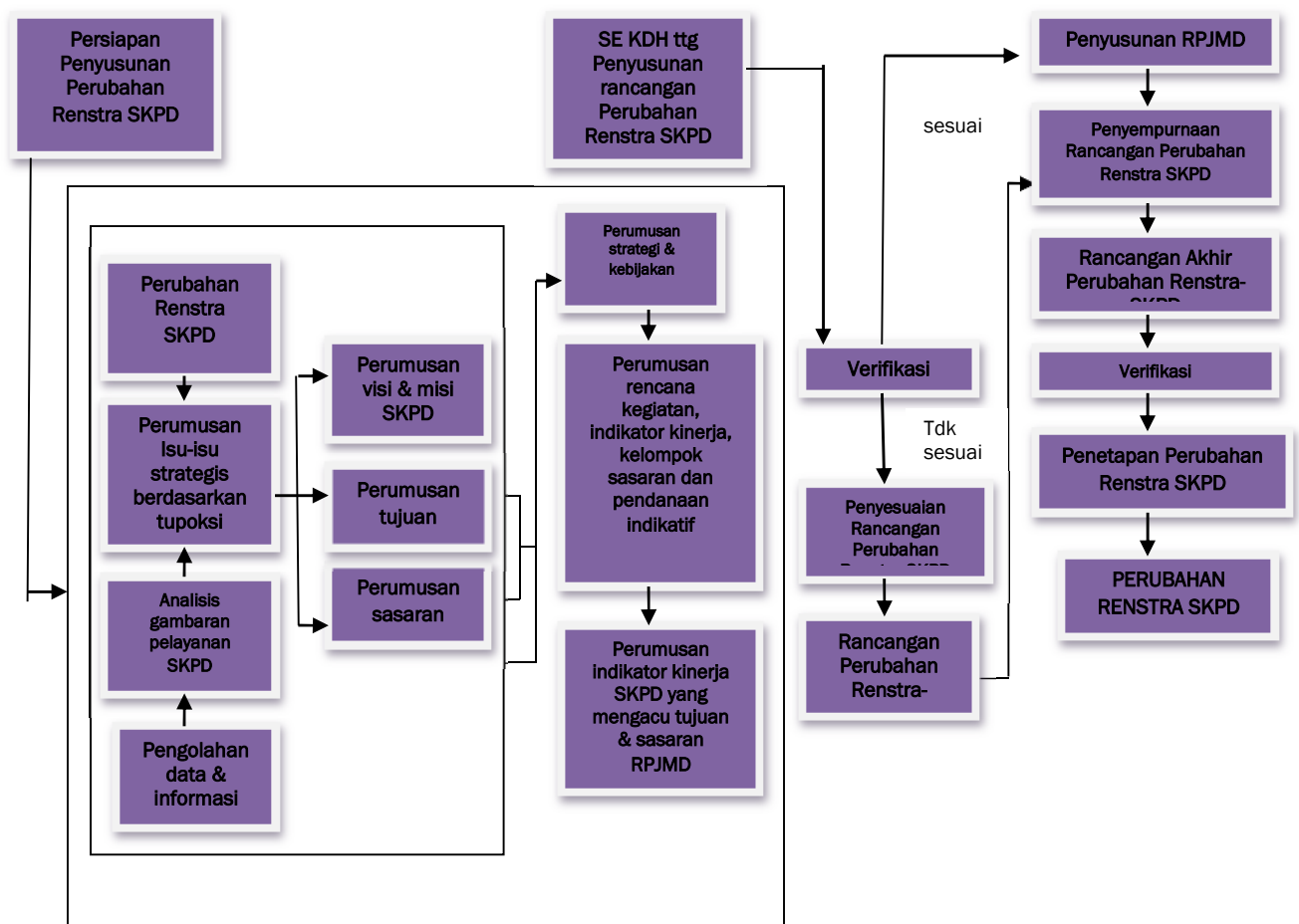
Dapat disimpulkan bahwa Perubahan Rencana Strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perubahan Rencana Strategis PD Pemerintah Provinsi Jawa Timur disusun dalam rangka menjabarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur akan menjelaskan strategi kebijakan dalam

kegiatan pembinaan dan pengawasan di Jawa Timur untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Perubahan Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya. Secara teknis, proses penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Perubahan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam Perubahan Renstra ini sejalan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Adapun tahapan penyusunan Perubahan Renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini :



Selanjutnya, di era pandemi Covid 19 ini, Jawa Timur juga menjadi Provinsi yang terdampak dari sisi kesehatan, sehingga mengalami krisis kesehatan masyarakat, dan tentunya juga berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Jawa Timur. Untuk menangani pandemi ini tentunya Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya dalam menanggulangnya, dan untuk menangani Covid, diperlukan dukungan finansial untuk menyokong proses pengendalian penyebaran Corona, sehingga perlu dilakukan refocussing anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka banyak hal yang harus dilakukan dan dikawal pelaksanaannya dalam segala aspek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, antara lain :

- a) Membantu Kepala Daerah untuk percepatan penanganan pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD Tahun 2021 dengan memberikan pendapat terbaik terdapat pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD Tahun 2021. Langkah konkrit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapat APBD, menilai Kepatuhan Pemda dalam penyampaian LRA dan Laporan Posisi Kas Bulanan, serta menginventarisir permasalahan yang ditemukan terkait penyerapan APBD, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya permasalahan sehingga dapat diberikan saran/ rekomendasi yang diberikan.
- b) Pengawalan PPKM Darurat/ Mikro yang disesuaikan dengan kriteria daerah masing-masing sehingga dapat terlaksana PPKM tersebut sesuai dengan kebijakan daerah terkait pelaksanaan PPKM. Langkah konkrit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain mengawal pembentukan posko di tingkat kelurahan/ desa, mengawasi jumlah pelanggaran protokol kesehatan selama periode pelaporan, mengawasi Kepala Daerah dan ASN yang tidak sesuai dengan kebijakan PPKM yang dibawa ke ranah hukum pidana, serta menginventarisir permasalahan yang ditemukan terkait penyerapan APBD, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya permasalahan sehingga dapat diberikan saran/ rekomendasi yang diberikan.

- c) Pengawasan terhadap pemberian Vaksinasi. Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengawasi dari sisi jumlah target dan realisasi vaksinasi, serta menginventarisir permasalahan yang ditemukan terkait penyerapan APBD, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya permasalahan sehingga dapat diberikan saran/ rekomendasi yang diberikan.
- d) Pengawasan Penyederhanaan Perizinan Berusaha. Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap kebijakan daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pengawasan itu antara lain memantau implementasi terhadap aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (**OSS-RBA**) yang merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E).
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94).
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virius Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease.
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan.

31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2021 dan kemudahan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah.
32. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/1411/IJ tanggal 6 Juli 2021 perihal Pengawasan Kebijakan Strategis dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dan memberikan arah (*road map*) untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan tujuan dari Perubahan Renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembinaan dan pengawasan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Di samping itu, dokumen Perubahan Renstra juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

Bab 1 – Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bab 3 – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Perubahan Renstra
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab 4 – Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab 5 – Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 6 – Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab 7 – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 8 – Penutup

BAB 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian pada Tahun 2020 telah ditetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana berisi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang baru.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah membawa perubahan besar dalam struktur organisasi Inspektorat. Untuk menjamin adanya keselarasan dalam hal organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur yang mengatur organisasi dan tata kerja Inspektorat. Pada Tanggal 27 September 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020, Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa terdapat perubahan pengaturan terhadap struktur organisasi pada Inspektorat. Inspektorat merupakan Tipe A yang terdiri dari 1 Sekretariat dan terdapat penambahan 1 Inspektur Pembantu yang melaksanakan fungsi Investigasi. Penambahan ini untuk menguatkan peran Inspektorat terhadap pencegahan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah. Perubahan struktur ini penting dikarenakan apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat dapat melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan APIP sesuai dengan standar profesi dan terjaga kualitasnya.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Inspektur Pembantu Bidang pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain :

A. **Sekretaris**, mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Mempunyai fungsi :

- 1) pengelolaan pelayanan administrasi umum.
- 2) pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 3) pengelolaan administrasi keuangan.
- 4) pengelolaan administrasi perlengkapan.
- 5) pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah.
- 6) pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.
- 7) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
- 8) pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian.
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- 10) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
- 11) pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana.
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

I. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan.
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan.
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat.
- 4) menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian.
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi.

- 7) menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian.
- 8) menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan.
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

II. Sub Bagian Program dan Laporan, mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 2) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program dan anggaran.
- 3) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program dan anggaran.
- 4) menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi kebijakan organisasi dan regulasi.
- 5) menyiapkan dan mengelola data perencanaan dan anggaran.
- 6) menyiapkan bahan inventarisasi laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 7) menyiapkan bahan koordinasi laporan hasil pengawasan.
- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan.
- 9) menyiapkan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan.
- 10) menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan.
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

III. Subbagian Keuangan , mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi.
- 2) menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- 3) menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar (SPM) UP, GU, TU, LS sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- 4) melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran.
- 5) melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- 6) melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan.
- 7) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik.
- 8) menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- 9) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).
- 10) menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya.
- 11) menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- 12) menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya.
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah maupun penanganan kasus administratif yang terjadi, pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta pelaksanaan program strategis nasional. Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu, mempunyai fungsi :

- a) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah
- b) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

- c) menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pembinaan/pengawasan program strategis nasional.
- d) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah
- e) erencanaan pembinaan dan/atau pengawasan program strategis nasional
- f) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- g) pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah
- h) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah
- i) pelaksanaan kerja sama terkait penyelenggaraan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya
- j) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- k) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
- l) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- m) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur
- n) penyusunan laporan hasil pengawasan
- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

I. Inspektur Pembantu I melaksanakan tugas dan fungsi pada :

- a. Badan Pendapatan Daerah Provinsi;
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi;
- c. Dinas Kesehatan Provinsi;
- d. Dinas Perhubungan Provinsi;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi;
- f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi;
- g. Dinas Kehutanan Provinsi;
- h. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
- i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. Rumah Sakit Haji Surabaya;
- k. Rumah Sakit Jiwa Menur;

- l. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
 - m. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi;
 - n. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi;
 - o. Bakorwil I di Kota Madiun
 - p. Kabupaten/Kota pada lingkup Bakorwil I di Kota Madiun
- II. Inspektur Pembantu II, melaksanakan tugas dan fungsi pada :
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi.
 - c. Dinas Sosial Provinsi.
 - d. Dinas Perkebunan Provinsi.
 - e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi.
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.
 - h. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi.
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
 - j. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.
 - k. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi.
 - l. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - m. Rumah Sakit Umum Daerah Syaiful Anwar Malang.
 - n. Bakorwil II di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - o. Kabupaten/Kota pada lingkup Bakorwil II di Kabupaten Bojonegoro.
- III. Inspektur Pembantu III, melaksanakan tugas dan fungsi pada :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
 - d. Inspektorat;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi;
 - f. Dinas Pendidikan Provinsi;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi;

- h. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi;
 - i. Dinas Peternakan Provinsi;
 - j. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi;
 - k. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
 - l. Bakorwil III di Kota Malang;
 - m. Bakorwil V di Kabupaten Jember; dan
 - n. Kabupaten/Kota pada lingkup Bakorwil III di Kota Malang
 - o. Bakorwil V di Kabupaten Jember.
- IV. Inspektur Pembantu IV, melaksanakan tugas dan fungsi pada :
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi;
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi;
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi;
 - i. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi;
 - j. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi;
- V. Inspektur Pembantu Khusus, mempunyai tugas melaksanakan :
- a. Penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
 - b. Penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dan/atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

- d. Koordinasi dan pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Instansi terkait; dan
 - e. Koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Aparat Penegak Hukum (APH).
- Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi;
 - b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait kegiatan pencegahan korupsi.
 - c. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - d. Penyiapan penyusunan koordinasi dan pelaksanaan Saber Pungli dengan Instansi terkait.
 - e. Penyiapan penyusunan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP APH.
 - f. Perencanaan program pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi.
 - g. Perencanaan program pencegahan korupsi.
 - h. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran pelaporan /pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.
 - i. Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
 - j. Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
 - k. Perencanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Saber Pungli dengan Instansi terkait.
 - l. Perencanaan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP APH.

- m. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- n. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Tersedianya sumber daya aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. menyadari hal tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur. Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat Jawa Timur hingga tahun 2021 mencapai 113 0rang, dengan rincian 63 orang berjenis kelamin laki-laki dan 50 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan terakhir magister (S2) yaitu sebanyak 41 orang, yang berpendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 47 orang.

Adapun rincian sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Timur (PNS) sampai tahun 2021 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah :

Tabel 2.2.1. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan pada Periode 2019-2024

No	Tahun	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	2019	13	77	18	3	111
2	2020	19	74	20	0	113
3	2021	19	78	16	0	113

Tabel 2.2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan pada Periode 2019-2024

No	Jabatan	2019	2020	2021
1.	Jabatan Struktural	9	9	9
	Inspektur (Es.II)	1	1	1
	Sekretaris (Es.III)	1	1	1
	Inspektur Pembantu Bidang (Es. III)	4	4	4
	Kasubag (Es.IV)	3	3	3
	Kasi (Es.IV)	0	0	0
2.	Jabatan Fungsional Auditor	51	47	47
	Auditor Madya	15	10	11
	Auditor Muda	25	27	30
	Auditor Pertama	11	10	6
3	Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian	2	2	2
	Audiwan Madya	0	0	0
	Audiwan Muda	1	2	2
	Audiwan Pertama	1	0	0
4	Jabatan Fungsional P2UPD	2	8	8
	PPUPD Madya	0	0	0
	PPUPD Muda	2	5	5
	PPUPD Pertama	0	3	3
5	Jabatan Fungsional Umum	47	47	47
Jumlah		111	113	113

Tabel 2.2.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan pada Periode 2019-2024

No	PENDIDIKAN	2019	2020	2021
1	Doktor (S3)	1	1	1
2	Pascasarjana (S2)	41	41	41
3	Sarjana (S1/D-IV)	47	44	47
4	Diploma (D-III)	1	1	2
5	SLTA /Sederajat	19	26	18
6	SLTP/Sederajat	2	0	1
Jumlah		111	113	113

B. Aset

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/ pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.4. Aset Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024

No.	URAIAN	2019		2020		2021	
		JUMLAH	NILAI (Rp)	JUMLAH	NILAI (Rp)	JUMLAH	NILAI (Rp)
1.	Tanah	5.000 m ²	3.750.000.000	5.000 m ²	3.750.000.000	5.000 m ²	3.750.000.000
2.	Peralatan dan Mesin	2.296 unit	16.735.726.218	1828 unit	14.716.065.038	1871 unit	14.851.051.438
3.	Gedung dan Bangunan	8 buah	8.957.453.490	1 buah	112.232	1 buah	112.232
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1 buah	13.822.000	1 buah	13.822.000	1 buah	138.222.000
5.	Aset Tetap Lainnya	360	143.772.470	360	143.772.470	360	143.772.470
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	—	—	—	—	—	—
NILAI TOTAL (Rp)		29.600.774.178		20.266.506.334		20.401.492.734	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK -2019	Target SPM	Target IKK (2019)	Target Indikator Lainnya (2019)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-		Keterangan
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7						8		9		10
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					81	81	81	81	81	81	81	81	100	100	sasaran telah sesuai dengan target

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran						Rasio Realisasi Anggaran Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		23.156.000.000	21.872.658.000	21.468.256.500	29.879.383.000	32.480.000.000	31.878.618.000	16.245.037.983	19.072.795.034					70,15%	87,20%					10,12%	15,27%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.612.008.250	2.106.789.500	2.596.508.775	2.689.576.075	2.556.016.000	2.474.589.000	2.015.148.502	1.887.019.020					77,15%	89,57%					0,63%	4,68%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.718.484.250	3.160.600.000	2.344.045.500	2.680.384.725	2.696.248.000	4.003.631.000	2.236.399.868	2.622.551.328					82,27%	82,98%					1,34%	3,08%
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	36.000.000	176.230.000	217.964.000	165.795.000	118.920.000	112.200.000	8.000.000	164.080.400					22,22%	93,11%					90,25%	12,10%
4	Program Penyusunan , Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan	-	216.750.000	170.754.200	95.769.200	199.440.000	190.880.000	-	163.834.800					-	75,59%					14,37%	-13,90%
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	1.735.335.000	1.937.010.500	1.591.490.000	2.324.815.000	4.087.530.000	3.367.598.000	952.811.427	1.703.632.219					54,91%	87,95%					28,92%	26,73%

No	Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran						Rasio Realisasi Anggaran Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	970.940.00	1.219.199.000	557.763.000	669.835.000	1.231.610.000	832.070.000	828.601.97	1.164.985.265					85,34%	95,55%					18,82%	-5,08%
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	406.820.000	392.764.000	100.890.000	224.260.000	14.300.000	37.050.000	110.940.950	91.625.300					27,27%	23,33%					-12,28%	12,42%
8	Program Pencegahan Korupsi	-	751.605.000	346.980.000	2.217.358.000	2.542.151.000	2.110.525.000	-	487.318.100					-	64,84%					166,62%	13,72%
9	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja	14.676.412.500	11.911.710.000	13.541.861.025	18.811.590.000	19.033.785.000	18.750.075.000	10.093.135.261	10.787.748.602					68,77%	90,56%					8,74%	14,18%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			73.967.613.850	74.979.378.268	76.365.200.247	81.458.778.909														

No	Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran						Rasio Realisasi Anggaran Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			9.335.206.050	8.429.482.271	8.674.679.428	9.234.546.589														
13	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			6.044.630.100	5.246.862.000	5.484.206.000	5.797.416.000														

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

A. Tantangan

1. Kemampuan untuk mempertahankan Opini BPK RI Provinsi Jawa Timur.
2. Bertambahnya peran Inspektorat untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan maupun reviu-reviu.
3. Bertambahnya jumlah pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur.
4. Bertambahnya Program/Kegiatan dari Pemerintah Pusat.
5. Kemampuan untuk meningkatkan skor Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK-RI dan BPS tiap tahunnya.

B. Peluang

1. Mendapatkan dukungan dari Gubernur Jawa Timur terhadap pelaksanaan Tupoksi Inspektorat.
2. Kerjasama dengan KPK-RI terkait pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan lebih optimal dan komprehensif khususnya pada Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Semakin banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terkait penyelenggaraan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur.
5. Sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat lebih optimal setelah dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) APIP-APH pada tahun 2018 lalu.

Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Penerapan good and clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum optimal	1	Belum tercapainya pemerintahan yang bersih melalui pendekatan SPIP	1	Integritas ASN belum optimal
				2	Penguatan SPIP pada masing-masing OPD belum optimal
		2	Pengelolaan keuangan daerah belum optimal	1	ASN belum memahami ketentuan pengelolaan keuangan daerah
				2	Kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan masih rendah
				3	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum optimal

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Timur di masa mendatang.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah **Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong**. Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu “Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak.”

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu misi ke tiga :

“Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.”

3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur selama periode 2014–2019 masih dijumpai adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan sehingga masih dijumpai adanya keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- 2) Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada penambahan yang signifikan. Di samping itu kompetensi Auditor/P2UPD/Auditor Kepegawaian dan tenaga operasional yang ada masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi kompeten di bidangnya.

- 3) Masih terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang telah direncanakan namun tidak dapat direalisasikan karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas lainnya yaitu: BPK-RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 4) Seringnya kegiatan rapat koordinasi dari instansi vertikal atau lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan di Provinsi Jawa Timur yang tidak disertai anggaran dalam pelaksanaannya, sehingga perlunya Inspektorat Provinsi Jawa Timur menganggarkan kegiatan rapat koordinasi atau forum diskusi dengan Instansi Pemerintah Lain/ Kabupaten/Kota.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Timur di masa mendatang.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaannya terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam meningkatkan pembinaan pada Tahun 2020 dan 2021 melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam rangka peningkatan level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dalam rangka mempertahankan/meningkatkan Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan :

1. Pengawasan dan Pendampingan yang dilaksanakan oleh Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap Pengelolaan Keuangan dan Belanja pada perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur;

2. Sekretariat Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai *supporting system*, turut berperan dengan melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu dengan :
 - Mensuport kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian) agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan dengan efektif karena keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan tugas jika dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan.
 - Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menggambarkan kesesuaian antara anggaran pengawasan di Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja pengawasan.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal/Eksternal, BPKP RI dan BPK RI, yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan Desk/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, BPKP dan BPK RI pada perangkat daerah terperiksa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk penyelesaian tindak lanjutnya hingga mendapatkan status Tuntas.
 - Monitoring dan evaluasi kinerja di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Program Prioritas Pembangunan, seperti kinerja penanganan covid-19, percepatan penyerapan APBD.
3. Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah pada 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang diukur dengan persentase Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh kategori \geq Tinggi dan Persentase Penurunan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Rendah;

4. Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Sekretariat Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi PPG Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) untuk penyusunan konsep kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta memfasilitasi penerusan pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya dilakukan sosialisasi tentang gratifikasi dan pencegahannya;
5. Sebagai tindak lanjut terhadap Evaluasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Tim Daerah Evaluasi Pelayanan Publik, dimana Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Sekretaris Tim Daerah, melalui penilaian dan penetapan yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Provinsi Jawa Timur. Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM diawali pada Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur khususnya pada UPT Jembatan Timbang di seluruh Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu (P2T) pada tahun 2012. Pada Tahun 2020 hanya 1 (satu) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBM yaitu UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Nganjuk.
6. Inspektorat Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur melakukan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan ke Desa meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Desa (BKD), Dana Desa (DD), dan hibah-bansos, dengan membuka ruang konsultasi bagi perangkat desa yang diberi nama “KADES LAWAS” yang merupakan akronim dari KAWAL DESA MELALUI PENGAWASAN. Klinik ini merupakan inisiatif dan inovasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan organisasi perangkat daerah

Kabupaten untuk bersama-sama memberikan solusi terhadap segala permasalahan terkait pengelolaan bantuan keuangan di Desa yang selama ini dianggap menjadi masalah oleh perangkat desa.

Dalam hal memperhatikan kualitas penerapan akuntabilitas, evaluasi juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya. Uraian selengkapnya secara singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Secara umum Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah menyusun dokumen perencanaan dan telah menjabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja ke seluruh ASN di semua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran strategis dan hasil program;
3. Mekanisme cascade kinerja yang berpedoman pada proses bisnis organisasi;
4. Pelaksanaan reviu kinerja internal secara berkala belum optimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan Budaya Kinerja, Perangkat Daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan keberhasilan prestasi kinerja yang sudah tercapai, namun dapat meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan, berupa komitmen bersama mulai antar bidang hingga dengan Perangkat Daerah lain yang terkait secara holistik dan spasial.

2. Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan Renstra Tahun 2019 - 2024 sebagai acuan dalam membangun Organisasi. Apabila diperlukan, perlu dilakukan pemutakhiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini.
3. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.
4. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja, sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI yang telah ada agar bisa dioptimalkan agar dapat memanfaatkan aplikasi dengan baik.
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
6. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan Inspektorat Provinsi Jawa Timur agar senantiasa melakukan upaya inovasi untuk melakukan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Inspektorat Provinsi Jawa Timur, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab moral terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, guna merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 3 di atas, di antara misi-misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu *tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris*. Untuk mendukung misi tersebut, Inspektorat merumuskan tujuan yaitu **“Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi”** dengan indikator tujuan Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh KPK-RI yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yaitu :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Indikator sasaran untuk menghitung sasaran tersebut antara lain :
Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK-RI dibagi 2;

Pernyataan tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KINERJA TUJUAN/ SASARAN							
				2019		2020		TARGET KINERJA			
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2024
Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi		Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Indeks	76	76,42	76	76,1	76	76	76	76
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2	nilai	81	81	81	81	81	81	81	81

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun strategi Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya;
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah melalui penjaminan mutu hasil pelaporan;
3. Mendorong implementasi SPIP pada PD sebagai salah satu prasyarat tercapainya reformasi birokrasi;
4. Meningkatkan level kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi, sarana dan prasarana terkait pengawasan dan pembinaan.

Sedangkan Arah Kebijakan Inspektorat :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis;
2. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan;
3. Meningkatkan penjaminan mutu melalui reviu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban laporan keuangan;
4. Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada PD ;
5. Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas, Whistle Blower System (WBS), dan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Suap.
6. Memberikan klinik konsultasi/pembinaan kepada pengelola keuangan terkait pemahaman terhadap ketentuan yang ada;
7. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan pada perangkat daerah.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1.

Di samping itu, Inspektorat Provinsi Jawa Timur mendukung Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu pada Bhakti-8: Jatim Amanah “Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif dan antikorupsi,” yang diwujudkan dalam Program dan Kegiatan sebagaimana tersaji pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur

VISI : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.			
MISI 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	1 Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis
		2 Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah melalui penjaminan mutu hasil pelaporan	2 Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan 3 Meningkatkan penjaminan mutu melalui reviu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban laporan keuangan
	2 Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	1 Mendorong implementasi SPIP pada PD sebagai salah satu prasyarat tercapainya reformasi birokrasi	1 Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada PD
			2 Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower System (WBS)
	3 Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	1 Meningkatkan level kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi, sarana dan prasarana terkait pengawasan dan pembinaan	3 Memberikan klinik konsultasi/ pembinaan kepada pengelola keuangan terkait pemahaman terhadap ketentuan yang ada
			1 Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan pada perangkat daerah

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan. Inspektorat memiliki 3 Program, 11 Kegiatan, dan 51 sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 7 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Pengadaan Mebel
 - 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Daerah
 - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- 8 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3 Reviu Laporan Kinerja
 - 4 Reviu Laporan Keuangan
 - 5 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
 - 6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 9 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN

C. ASISTENSI

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas

- 10 Pengawasan
 - 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- 11 Pendampingan dan Asistensi
 - 1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Untuk mengukur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, maka diperlukan pengukuran dengan menggunakan indikator masing-masing program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta capaian dari program, kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun 2019, 2020, dan 2021.

Tabel 6.1. Program dan kegiatan tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	2019		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi				Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur		76,2	<u>50.658.068.937,00</u>	INSPEKTORAT	JAWA TIMUR
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2					
		3.05.0100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	%	100	4.102.684.380,00		
		3.05.0100.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	skor kepuasan pegawai Inspektorat terhadap pelayanan administrasi perkantoran	%	100	4.102.684.380,00		
		3.05.0100.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	100	8.563.444.055,00		
		3.05.0100.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	skor kepuasan pegawai Inspektorat terhadap penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana	%	100	6.276.765.023,00		
		1.20.0600.02.012.5.2.02.031	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	skor kepuasan pegawai inspektorat terhadap penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana	%	100	2.286.679.032,00		
		3.05.0100.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Presentase kelembagaan yang tepat fungsi	%	100	156.298.424,00		

		3.05.0100 .07.001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	%	100	35.647.524,00		
		3.05.0100 .07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal	%	100	120.650.900,00		
				Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM					
		3.05.0100 .08	Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100	401.905.700,00		
		3.05.0100 .08.001	Penyusunan dokumen perencanaan	jumlah dokumen perencanaan	%	100	4.591.700,00		
		3.05.0100 .08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	jumlah dokumen pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	%	100	0,00		
		3.05.0100 .08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	jumlah update database perangkat daerah	%	25	394.003.500,00		
		3.05.0100 .08.003	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	%	100	3.310.500,00		
		3.05.0100 .20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	100	4.881.928.907,00		
		3.05.0100 .20.008	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat, BPK, Irjen	%	100	2.238.626.238,00		
		3.05.0100 .20.012	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Dokumen Kebijakan Pengawasan	%	100	2.643.302.669,00		

		3.05.0100.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	<i>Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat/ PKS</i>	%	100	957.027.573,00		
		3.05.0100.21.001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ PKS	%	100	957.027.573,00		
		3.05.0100.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan	%	8	0,00		
		3.05.0100.22.002	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	SOP Pengawasan	%	50	0,00		
		3.05.0100.79	Program Pencegahan Korupsi	Penilaian WBK WBBM (Jumlah PD)	%	100	4.572.513.926,00		
		3.05.0100.79.001	Kegiatan Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Indeks integritas Provinsi Jawa Timur	%	100	4.572.513.926,00		
		3.05.0100.92	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	<i>Prosentase Kerugian Daerah</i>		100	27.022.265.972,00		
		3.05.0100.92.001	Pemeriksaan Reguler SKPD/UPT	Obyek Pemeriksaan		100	15.277.013.197,00		
		3.05.0100.92.002	Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler (2018 & 2019)	Obyek Pemeriksaan		100	7.358.827.837,00		
		3.05.0100.92.003	Pemeriksaan tujuan tertentu	Obyek Pemeriksaan		100	761.053.495,00		
		3.05.0100.92.004	Pemeriksaan Khusus	Obyek Pemeriksaan		100	558.786.097,00		
		3.05.0100.92.005	Pemeriksaan Kasus	Obyek Pemeriksaan		100	1.459.816.388,00		

		3.05.0100 .92.006	Review Laporan Keuangan	Laporan Review		100	552.600.000,00		
		3.05.0100 .92.007	Evaluasi LPPD	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi		100	1.018.236.759,00		
		3.05.0100 .92.008	Evaluasi LAKIP	Jumlah SKPD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan nilai A		21,58	30.282.199,00		
		3.05.0100 .92.009	Telaah sejawat hasil pengawasan	Paparan Hasil Pemeriksaan		85,61	5.650.000,00		

Tabel 6.2. Program dan Kegiatan Tahun 2020

SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SU B KEGIATAN	SATU AN	2020 (CAPAIAN)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJA WAB	LOKA SI
									TARG ET	Rp		
2	3					4	5	6	7	8	9	10
							Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur		77	<u>23.302.560.359,00</u>	INSPEKTORAT	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2					
	3	0	0	0		Program Pelayanan Kesekretariatan Inspektorat	Persentase indikator program Inspektorat yang tercapai	%	91,22	8.667.962.880,00		
							Persentase realisasi anggaran					
							Indeks profesionalitas ASN					
	3	0	0	0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen		42,3	5.160.880,00		
	3	0	0	0	00	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen		89,77	377.603.000,00		
	3	0	0	0	00	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen		91,35	8.285.199.000,00		

SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SU B KEGIATAN	SATU AN	2020 (CAPAIAN)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp		
2	3					4	5	6	7	8	9	10
							ketatausahaan dan kepegawaian					
	3	0	0	1		Program Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Reviu		80,32	621.100.575,00		
	3	0	0	1	00	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan reviu		72,04	246.133.275,00		
	3	0	0	1	00	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan reviu		88,8	325.106.800,00		
	3	0	0	1	00	Reviu Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah laporan reviu		76,12	49.860.500,00		
	3	0	0	2		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		91,05	1.694.398.742,00		
	3	0	0	2	00	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat		94,74	1.184.353.733,00		
							Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI					

SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SU B KEGIATAN	SATU AN	2020 (CAPAIAN)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp		
2	3					4	5	6	7	8	9	10
							Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri					
	3	0	0	2	00	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Dokumen pelaksanaan kegiatan		83,37	510.045.009,00		
	3	0	0	1		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kerugian Daerah		88,53	10.433.295.531,00		
	3	0	0	1	00	Pengawasan Reguler PD/ UPT	Obyek Pemeriksaan		98,56	3.168.408.580,00		
	3	0	0	1	00	Monev Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	Obyek Pemeriksaan		99,89	1.647.101.763,00		
	3	0	0	1	00	Pemeriksaan Tujuan Tertentu/ Kasus/ Khusus	Obyek Pemeriksaan		85,63	3.820.790.594,00		
	3	0	0	1	00	Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa	Jumlah kabupaten yang dilakukan klinik konsultasi		65,82	713.650.900,00		

SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATU AN	2020 (CAPAIAN)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp		
2	3					4	5	6	7	8	9	10
	3	0	0	1	00	Klinik Konsultasi pada Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan klinik konsultasi		46,26	131.008.500,00		
	3	0	0	1	00	evaluasi LPPD	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi		94,28	904.235.194,00		
	3	0	0	1	00	evaluasi LAKIP	Jumlah PD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai A		36,03	48.100.000,00		
	3	0	0	7		Program Pencegahan Korupsi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi		87,44	1.885.802.631,00		
	3	0	0	7	00	Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Swasta	Rapat Kerja Anggota Komite Advokasi		42,4	45.875.000,00		

SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SU B KEGIATAN	SATU AN	2020 (CAPAIAN)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJA WAB	LOKA SI
									TARG ET	Rp		
2	3					4	5	6	7	8	9	10
							Daerah (KAD) Jawa Timur					
	3	0	0	7	00	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Pencanangan pada PD/ satker		86,76	99.125.000,00		
	3	0	0	7	00	Kerja Sama APIP-APH	Pelaksanaan Bimbingan Teknis		98,84	1.102.131.353,00		
							Rapat kerja pembahasan kasus/ pengaduan masyarakat					
	3	0	0	7	00	Peringatan Hari Anti Korupsi	Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi		79,43	181.154.100,00		
	3	0	0	7	00	Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Jumlah evaluasi		59,25	84.075.272,00		
	3	0	0	7	00	Survei Penilaian Integritas	Perangkat daerah yang disurvei					
	3	0	0	7	00	Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi	Pelaksanaan monev rencana aksi pada perangkat daerah		83,3	346.690.906,00		

SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SU B KEGIATAN	SATU AN	2020 (CAPAIAN)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJA WAB	LOKA SI
									TARG ET	Rp		
2	3					4	5	6	7	8	9	10
							Pelaksanaan monev rencana aksi pada Kabupaten/ Kota					
	3	0	0	7	00	Audit berkala SNI ISO 37001:2016	Jumlah audit internal dan eksternal		80,82	26.751.000,00		

Tabel 6.3 Program dan kegiatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								88.66 1.589. 000		91.89 4.318. 000		93.33 3.100. 000		94.72 2.266. 000		94.722.2 66.000	Inspektoral Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdampak dan antikorupsi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan			Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur														
				Indeks Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah														

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	n Daerah			dan Opini BPK RI dibagi 2														
		XXX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%		88	73.083.172.850	90	76.746.494.000	90	77.448.979.247	90	78.017.113.900	90	78.017.13.900		
				Persentase realisasi anggaran	%		94		94		95		95		95			
				Indeks profesionalitas ASN	Nilai		83		84		84		85		85			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX 0110 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	%		85	18.425.000	85	18.425.000	85	19.347.000	85	19.347.000	85	19.347.000		
		XXX 0110 101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		7	3.680.000	7	3.680.000	7	3.864.000	7	3.864.000	28	3.864.000		
		XXX 0110 102	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen		1	2.185.000	1	2.185.000	1	2.294.000	1	2.294.000	4	2.294.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dokumen RKA-SKPD															
		XXX 0110 103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen		1	2.185.000	1	2.185.000	1	2.294.000	1	2.294.000	4	2.294.000		
		XXX 0110 104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen		1	2.050.000	1	2.050.000	1	2.153.000	1	2.153.000	4	2.153.000		
		XXX 0110 105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen		1	2.050.000	1	2.050.000	1	2.153.000	1	2.153.000	4	2.153.000		
		XXX 0110 106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja	Dokumen		4	3.675.000	4	3.675.000	4	3.859.000	4	3.859.000	16	3.859.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX 0110 107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	Dokumen		4	2.600.000	4	2.600.000	4	2.730.000	4	2.730.000	16	2.730.000		
		XXX 0110 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan		12	66.641.705.000	12	69.494.573.000	12	70.345.959.247	12	71.429.465.900	48	71.429.465.900		
		XXX 0110 201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan		12	65.274.195.000	12	67.821.063.000	12	68.838.379.000	12	69.870.954.000	48	69.870.954.000		
		XXX 0110 202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan		12	1.338.540.000	12	1.638.540.000	12	1.470.861.247	12	1.521.792.900	48	1.521.792.900		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX 0110 203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	Laporan		12	16.910.000	12	22.910.000	12	24.056.000	12	24.056.000	48	24.056.000		
		XXX 0110 204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Laporan		1	2.060.000	1	2.060.000	1	2.163.000	1	2.163.000	4	2.163.000		
		XXX 0110 205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen keuangan SKPD	Dokumen		2	2.160.000	2	2.160.000	2	2.268.000	2	2.268.000	8	2.268.000		
		XXX 0110 206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen		1	2.160.000	1	2.160.000	1	2.268.000	1	2.268.000	4	2.268.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX 0110 207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	Laporan		12	4.900.000	12	4.900.000	12	5.145.000	12	5.145.000	48	5.145.000		
		XXX 0110 208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognos is	Laporan		1	780.000	1	780.000	1	819.000	1	819.000	4	819.000		
		XXX 0110 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan		12	896.045.000	12	853.650.000	12	657.333.000	12	687.333.000	48	687.333.000		
		XXX 0110 501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Presensi Pegawai	Laporan		12	64.300.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	48	50.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX 0110 502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket		1	42.000.000	1	44.100.000	1	8.100.000	1	8.100.000	4	8.100.000		
		XXX 0110 503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan		12	1.300.000	12	1.300.000	12	1.365.000	12	1.365.000	48	1.365.000		
		XXX 0110 504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan		1	18.200.000	1	18.200.000	1	19.110.000	1	19.110.000	4	19.110.000		
		XXX 0110 505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP	Laporan		12	174.150.000	12	174.150.000	12	182.858.000	12	182.858.000	48	182.858.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX 0110 509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		15	413.420.000	15	354.091.000	15	204.091.000	15	234.091.000	60	234.091.000		
		XXX 0110 511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali		1	182.675.000	1	211.809.000	1	191.809.000	1	191.809.000	4	191.809.000		
		XXX 0110 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang	Dokumen		11	1.045.518.850	11	989.987.000	11	971.688.000	11	1.125.173.000	44	1.125.173.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Habis Pakai														
		XXX 0110 601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		1	41.300.000	1	41.300.000	1	44.533.000	1	47.810.000	4	47.810.000		
		XXX 0110 602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		1	360.525.000	1	360.525.000	1	380.479.000	1	417.353.000	4	417.353.000		
		XXX 0110 603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		1	134.030.000	1	134.030.000	1	141.769.000	1	155.157.000	4	155.157.000		
		XXX 0110 605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		1	213.463.850	1	184.137.000	1	168.344.000	1	207.111.000	4	207.111.000		
		XXX 0110 608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		40	16.000.000	40	16.800.000	40	25.640.000	40	18.522.000	160	18.522.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX 0110 609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan		8	278.900.000	8	251.895.000	8	209.490.000	8	277.715.000	32	277.715.000		
		XXX 0110 610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	Dokumen		3	1.300.000	3	1.300.000	3	1.433.000	3	1.505.000	12	1.505.000		
		XXX 0110 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	Laporan		5	234.200.000	5	834.332.000	6	1.469.948.000	6	690.795.000	22	690.795.000		
		XXX 0110 705	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Paket		0	-	1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	400.000.000	3	400.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX 0110 706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket		4	234.200.000	4	334.332.000	4	469.948.000	4	290.795.000	16	290.795.000		
		XXX 0110 709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung		1		0		0		0		0			
		XXX 0110 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		12	3.279.219.000	12	3.577.063.000	12	2.974.616.000	12	3.086.536.000	48	3.086.536.000		
		XXX 0110 801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	Kali		24	18.000.000	24	18.900.000	24	20.045.000	24	20.837.000	96	20.837.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX 0110 802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paket		3	478.669.000	3	517.188.000	3	543.047.000	3	570.199.000	12	570.199.000		
		XXX 0110 803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	Paket		1	79.390.000	1	84.000.000	1	120.200.000	1	92.610.000	4	92.610.000		
		XXX 0110 804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket		1	2.703.160.000	1	2.956.975.000	1	2.291.324.000	1	2.402.890.000	4	2.402.890.000		
		XXX 0110 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset	Laporan		12	968.060.000	12	978.464.000	12	1.010.088.000	12	978.464.000	48	978.464.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		XXX 0110 901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket		11	127.610.000	11	90.991.000	11	70.491.000	11	90.991.000	44	90.991.000		
		XXX 0110 902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket		13	491.250.000	13	520.813.000	13	538.604.000	13	520.813.000	52	520.813.000		
		XXX 0110 906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket		1	209.200.000	1	219.660.000	1	220.643.000	1	219.660.000	4	219.660.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				yang dipelihara														
		XXX 0110 909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Gedung		2	140.000.000	2	147.000.000	2	180.350.000	2	147.000.000	8	147.000.000		
		601 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur	Level		3	9.369.106.050	3	8.816.962.000	3	9.276.961.800	3	9.904.290.100	3	9.904.290.100		
		6010 2101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah	Nilai		3	8.346.206.050	3	7.127.167.000	3	7.287.166.800	3	7.814.495.100	12	7.814.495.100		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				terperiksa														
		6010210101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai A atas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja	Perangkat Daerah		12	1.883.724.000	12	955.076.271	12	955.076.300	12	1.042.404.370	48	1.042.404.370		
				Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengaw	Obyek		10		10		10		10		40			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				asan kinerja														
				Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi obyek pengawasan kinerja	Obyek		20		10		20		20		70			
		6010210102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan keuangan	Obyek		90	4.346.692.000	90	4.309.586.729	90	4.309.586.500	90	4.509.586.730	360	4.509.586.730		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6010210103	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan reviu kinerja	Laporan		2	93.098.000	2	97.753.000	2	97.753.000	2	97.753.000	8	97.753.000		
				Jumlah Laporan reviu pengadaan barang/jasa	Laporan		1		1		1		1		4			
				Jumlah Laporan reviu Dokumen perencanaan dan penganggaran	Laporan		1		1		1		1		4			
		6010210104	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan reviu terkait Laporan keuangan	Laporan		7	209.104.000	7	219.559.000	7	219.559.000	7	219.559.000	28	219.559.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6010 2101 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai dengan kategori tinggi atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Kabupaten/Kota		30	752.460.000	30	775.083.000	30	805.083.000	30	875.083.000	120	875.083.000		
		6010 2101 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%		77	1.061.128.050	77	770.109.000	77	900.109.000	77	1.070.109.000	77	1.070.109.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemeriksaan APIP	Inspektorat														
				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	%		77		77		77		77		77			
				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri RI	%		80		80		80		80		80			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Jenis Kegiatan		5	1.022.900.000	5	1.689.795.000	5	1.989.795.000	5	2.089.795.000	20	2.089.795.000		
		6010210202	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT)	Obyek		33	1.022.900.000	33	1.689.795.000	33	1.989.795.000	33	2.089.795.000	132	2.089.795.000		
		60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN	Level Kapabilitas APIP	Level		3	6.209.310.100	3	6.330.862.000	3	6.607.158.953	3	6.800.862.000	3	6.800.862.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			N, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Provinsi Jawa Timur														
		60103101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan	Dokumen		2	240.420.100	2	252.441.000	2	302.441.000	2	402.441.000	8	402.441.000		
		6010310101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah pelaksanaan koordinasi tentang kebijakan pengawasan	Kali		3	240.420.100	3	252.441.000	3	302.441.000	3	402.441.000	12	402.441.000		
		60103102	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan	%		85	5.968.890.000	85	6.078.421.000	85	6.304.717.953	85	6.398.421.000	85	6.398.421.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				pingan dan Asistensi														
		6010310201	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi obyek klinik konsultasi	Kabupaten/Kota		12	949.332.000	12	950.799.000	12	980.799.000	12	1.050.799.000	48	1.050.799.000		
				Jumlah perangkat daerah yang menjadi obyek klinik konsultasi	Perangkat Daerah		20		20		20		20		80			
				Pendampingan atas pemeriksaan	Kali		4		4		4		4		16			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				yang dilaksanakan akan oleh BPK-RI														
		6010310202	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pencana ngan WBKWB BM pada perangkat daerah/ unit kerja	Perangkat Daerah		2	52.640.000	2	85.272.000	2	90.272.000	2	105.272.000	8	105.272.000		
		6010310203	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaksanaan identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Kali		1	3.932.010.000	1	3.828.611.000	1	3.849.907.953	1	4.028.611.000	4	4.028.611.000		
				Pelaksanaan monev pencegahan	Kabupaten/ Kota		10		10		10		10		40			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				han korupsi pada Kabupaten/Kota														
				Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada perangkat daerah	Perangkat Daerah		8		8		8		8		32			
				Jumlah peringatan hari anti korupsi	Kali		1		1		1		1		4			
		6010310204	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan audit berkala SNI ISO 37001:2016	Kali		1	1.034.908.000	1	1.213.739.000	1	1.383.739.000	1	1.213.739.000	4	1.213.739.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi kerja sama APIP-APH	Kali		1		1		1		1		4			
				Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek Survei Penilaian Integritas (SPI)	Obyek		6		6		6		6		24			
				Rapat kerja anggota Komite Advokasi Daerah	Kali		1		1		1		1		4			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEG	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				(KAD) Jawa Timur														
				Jumlah Pelaksanaan Rapat kerja APIP-APH pembahasan kasus/pengaduan masyarakat	Kali		30		30		30		30		120			

Bab 7

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Provinsi Jawa Timur di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2014.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4				5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	81	81	81	81	81	81	81

TABEL 7.2 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG NAWABHAKTI

NAWABHAKTI	PROG ICON	PROGRAM NOMENKATLATUR	KEGIATAN NUNENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bhakti – 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	Pengawasan	Program Pencegahan Korupsi			2.428.765.100,00	3.694.375.000	3.694.375.000	3.694.375.000
			Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Swasta		51.000.000,00	126.500.000	126.500.000	126.500.000
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	51.000.000,00			
			Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		114.250.000,00	43.105.000	43.105.000	43.105.000
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	114.250.000,00			
			Kerja Sama APIP-APH		866.600.000,00	1.275.750.000	1.275.750.000	1.275.750.000
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	866.600.000,00			
			Peringatan Hari Anti Korupsi		236.550.000,00	257.950.000	257.950.000	257.950.000

NAWABHAKTI	PROG ICON	PROGRAM NOMENKATLATUR	KEGIATAN NUMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	236.550.000,00			
			Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)		532.217.100,00	1.278.350.000	1.278.350.000	1.278.350.000
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	532.217.100,00			
			Survei Penilaian Integritas		193.498.000,00	123.150.000	123.150.000	123.150.000
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	193.498.000,00			
			Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi		398.050.000,00	539.070.000	539.070.000	539.070.000

NAWABHAKTI	PROG ICON	PROGRAM NOMENKATLATUR	KEGIATAN NUMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	398.050.000,00			
			Audit Berkala SNI ISO 37001:2016		36.600.000,00	50.500.000	50.500.000	50.500.000
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36.600.000,00			

Bab 8 Penutup

Demikian Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2019-2024 disusun untuk menjadi *road map* dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja di tahun-tahun yang akan datang sehingga misi Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian visi dan tujuan Inspektorat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya,

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 196303251989031013

LAMPIRAN I E-PLANNING

Tabel E-Planning

E-PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2020	TAHUN								Kondisi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Inspektoral						88.661.589.000		91.894.318.000		93.333.100.000		94.722.266.000	
XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%		88	73.083.172.850	90	76.746.494.000	90	77.448.979.247	90	78.017.113.900	90
		Persentase realisasi anggaran	%		94		94		95		95		95
		Indeks profesionalitas ASN	Nilai		83		84		84		85		85
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	%		85	18.425.000	85	18.425.000	85	19.347.000	85	19.347.000	85
XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		7	3.680.000	7	3.680.000	7	3.864.000	7	3.864.000	28
XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen		1	2.185.000	1	2.185.000	1	2.294.000	1	2.294.000	4

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kond isi Awal 2020	TAHUN								Kond isi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
XXX01101 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen		1	2.185.000	1	2.185.000	1	2.294.000	1	2.294.000	4
XXX01101 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen		1	2.050.000	1	2.050.000	1	2.153.000	1	2.153.000	4
XXX01101 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen		1	2.050.000	1	2.050.000	1	2.153.000	1	2.153.000	4
XXX01101 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja	Dokumen		4	3.675.000	4	3.675.000	4	3.859.000	4	3.859.000	16
XXX01101 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	Dokumen		4	2.600.000	4	2.600.000	4	2.730.000	4	2.730.000	16
XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungja waban keuangan	Laporan		12	66.641.705.0 00	12	69.494.573.0 00	12	70.345.959.2 47	12	71.429.465.9 00	48
XXX01102 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan		12	65.274.195.0 00	12	67.821.063.0 00	12	68.838.379.0 00	12	69.870.954.0 00	48
XXX01102 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan		12	1.338.540.00 0	12	1.638.540.00 0	12	1.470.861.24 7	12	1.521.792.90 0	48
XXX01102 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	Laporan		12	16.910.000	12	22.910.000	12	24.056.000	12	24.056.000	48

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kond isi Awal 2020	TAHUN								Kond isi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
XXX01102 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Laporan		1	2.060.000	1	2.060.000	1	2.163.000	1	2.163.000	4
XXX01102 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen keuangan SKPD	Dokumen		2	2.160.000	2	2.160.000	2	2.268.000	2	2.268.000	8
XXX01102 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen		1	2.160.000	1	2.160.000	1	2.268.000	1	2.268.000	4
XXX01102 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	Laporan		12	4.900.000	12	4.900.000	12	5.145.000	12	5.145.000	48
XXX01102 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis	Laporan		1	780.000	1	780.000	1	819.000	1	819.000	4
XXX01105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan		12	896.045.000	12	853.650.000	12	657.333.000	12	687.333.000	48
XXX01105 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Presensi Pegawai	Laporan		12	64.300.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	48
XXX01105 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket		1	42.000.000	1	44.100.000	1	8.100.000	1	8.100.000	4

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kond isi Awal 2020	TAHUN								Kond isi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
XXX01105 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan		12	1.300.000	12	1.300.000	12	1.365.000	12	1.365.000	48
XXX01105 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan		1	18.200.000	1	18.200.000	1	19.110.000	1	19.110.000	4
XXX01105 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP	Laporan		12	174.150.000	12	174.150.000	12	182.858.000	12	182.858.000	48
XXX01105 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		15	413.420.000	15	354.091.000	15	204.091.000	15	234.091.000	60
XXX01105 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kali		1	182.675.000	1	211.809.000	1	191.809.000	1	191.809.000	4
XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai	Dokumen		11	1.045.518.85 0	11	989.987.000	11	971.688.000	11	1.125.173.00 0	44
XXX01106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		1	41.300.000	1	41.300.000	1	44.533.000	1	47.810.000	4

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kond isi Awal 2020	TAHUN								Kond isi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
XXX01106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		1	360.525.000	1	360.525.000	1	380.479.000	1	417.353.000	4
XXX01106 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		1	134.030.000	1	134.030.000	1	141.769.000	1	155.157.000	4
XXX01106 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		1	213.463.850	1	184.137.000	1	168.344.000	1	207.111.000	4
XXX01106 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	Paket		40	16.000.000	40	16.800.000	40	25.640.000	40	18.522.000	160
XXX01106 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan		8	278.900.000	8	251.895.000	8	209.490.000	8	277.715.000	32
XXX01106 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	Dokumen		3	1.300.000	3	1.300.000	3	1.433.000	3	1.505.000	12
XXX01107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	Laporan		5	234.200.000	5	834.332.000	6	1.469.948.00 0	6	690.795.000	22
XXX01107 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Paket		0	-	1	500.000.000	1	1.000.000.00 0	1	400.000.000	3
XXX01107 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket		4	234.200.000	4	334.332.000	4	469.948.000	4	290.795.000	16
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang	Dokumen		12	3.279.219.00 0	12	3.577.063.00 0	12	2.974.616.00 0	12	3.086.536.00 0	48

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2020	TAHUN								Kondisi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Urusan Pemerintahan Daerah											
XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	Kali		24	18.000.000	24	18.900.000	24	20.045.000	24	20.837.000	96
XXX0110802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paket		3	478.669.000	3	517.188.000	3	543.047.000	3	570.199.000	12
XXX0110803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	Paket		1	79.390.000	1	84.000.000	1	120.200.000	1	92.610.000	4
XXX0110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket		1	2.703.160.000	1	2.956.975.000	1	2.291.324.000	1	2.402.890.000	4
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset	Laporan		12	968.060.000	12	978.464.000	12	1.010.088.000	12	978.464.000	48
XXX0110901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket		11	127.610.000	11	90.991.000	11	70.491.000	11	90.991.000	44
XXX0110902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket		13	491.250.000	13	520.813.000	13	538.604.000	13	520.813.000	52

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kond isi Awal 2020	TAHUN								Kond isi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
XXX01109 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Paket		1	209.200.000	1	219.660.000	1	220.643.000	1	219.660.000	4
XXX01109 09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Gedung		2	140.000.000	2	147.000.000	2	180.350.000	2	147.000.000	8
60102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas penyelenggar aan SPIP Provinsi Jawa Timur	Level		3	9.369.106.0 50	3	8.816.962.0 00	3	9.276.961.8 00	3	9.904.290.1 00	3
6E+07	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah terperiksa	Nilai		3	8.346.206.05 0	3	7.127.167.00 0	3	7.287.166.80 0	3	7.814.495.10 0	12
60102101 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai A atas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja	Perangkat Daerah		12	1.883.724.00 0	12	955.076.271	12	955.076.300	12	1.042.404.37 0	48
		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan kinerja	Obyek		10		10		10		10		40

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kond isi Awal 2020	TAHUN								Kond isi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
		Jumlah Kabupaten/Kot a yang menjadi obyek pengawasan kinerja	Obyek		20		10		20		20		70
60102101 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan keuangan	Obyek		90	4.346.692.00 0	90	4.309.586.72 9	90	4.309.586.50 0	90	4.509.586.73 0	360
60102101 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan reviu kinerja	Laporan		2	93.098.000	2	97.753.000	2	97.753.000	2	97.753.000	8
		Jumlah Laporan reviu pengadaan barang/jasa	Laporan		1		1		1		1		4
		Jumlah Laporan reviu Dokumen perencanaan dan penganggaran	Laporan		1		1		1		1		4
60102101 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan reviu terkait Laporan keuangan	Laporan		7	209.104.000	7	219.559.000	7	219.559.000	7	219.559.000	28

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kond isi Awal 2020	TAHUN								Kond isi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
60102101 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kot a yang mendapatkan nilai dengan kategori tinggi atas Evaluasi Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Kabupaten/ Kota		30	752.460.000	30	775.083.000	30	805.083.000	30	875.083.000	120
60102101 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat	%		77	1.061.128.05 0	77	770.109.000	77	900.109.000	77	1.070.109.00 0	77
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	%		77		77		77		77		77
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendaqri RI	%		80		80		80		80		80

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kond isi Awal 2020	TAHUN								Kond isi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
6E+07	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Jenis Kegiatan		5	1.022.900.00 0	5	1.689.795.00 0	5	1.989.795.00 0	5	2.089.795.00 0	20
60102102 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT)	Obyek		33	1.022.900.00 0	33	1.689.795.00 0	33	1.989.795.00 0	33	2.089.795.00 0	132
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur	Level		3	6.209.310.1 00	3	6.330.862.0 00	3	6.607.158.9 53	3	6.800.862.0 00	3
6E+07	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan	Dokumen		2	240.420.100	2	252.441.000	2	302.441.000	2	402.441.000	8
60103101 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah pelaksanaan koordinasi tentang kebijakan pengawasan	Kali		3	240.420.100	3	252.441.000	3	302.441.000	3	402.441.000	12
60103102	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Kegiatan	%		85	5.968.890.00 0	85	6.078.421.00 0	85	6.304.717.95 3	85	6.398.421.00 0	85

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kond isi Awal 2020	TAHUN								Kond isi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
		Pendampingan dan Asistensi											
60103102 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kabupaten/Kot a yang menjadi obyek klinik konsultasi	Kabupaten/ Kota		12	949.332.000	12	950.799.000	12	980.799.000	12	1.050.799.00 0	48
		Jumlah perangkat daerah yang menjadi obyek klinik konsultasi	Perangkat Daerah		20		20		20		20		80
		Pendampingan atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI	Kali		4		4		4		4		16
60103102 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pencanangan WBKWBBM pada perangkat daerah/unit kerja	Perangkat Daerah		2	52.640.000	2	85.272.000	2	90.272.000	2	105.272.000	8
60103102 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaksanaan identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Kali		1	3.932.010.00 0	1	3.828.611.00 0	1	3.849.907.95 3	1	4.028.611.00 0	4
		Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada	Kabupaten/ Kota		10		10		10		10		40

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kond isi Awal 2020	TAHUN								Kond isi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
		Kabupaten/Kot a											
		Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada perangkat daerah	Perangkat Daerah		8		8		8		8		32
		Jumlah peringatan hari anti korupsi	Kali		1		1		1		1		4
60103102 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan audit berkala SNI ISO 37001:2016	Kali		1	1.034.908.00 0	1	1.213.739.00 0	1	1.383.739.00 0	1	1.213.739.00 0	4
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi kerja sama APIP-APH	Kali		1		1		1		1		4
		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek Survei Penilaian Integritas (SPI)	Obyek		6		6		6		6		24
		Rapat kerja anggota Komite Advokasi	Kali		1		1		1		1		4

E- PLANNING Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kond isi Awal 2020	TAHUN								Kond isi Akhir
					2021		2022		2023		2024		
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	
		Daerah (KAD) Jawa Timur											
		Jumlah Pelaksanaan Rapat kerja APIP-APH pembahasan kasus/pengadu an masyarakat	Kali		30		30		30		30		120